

Asrul : Film Harus Merupakan Pembawa Misi Kebudayaan

JAKARTA, — "Film harus merupakan pembawa misi kebudayaan. Karena, dahulu kebudayaan sebagai misi, di kembangkan dalam bentuk ba-
caan, pementasan dan sebagai-nya "demikian diungkapkan Ketua Harian Dewan Film Nasional Drs. Asrul Sani dalam keterangannya pertama ten-
tang "Pola dasar pembinaan dan pengembangan perfilman Nasional" yg diundang-
kan Senin siang kemarin di Press Club Jakarta.

Dituturkan, di abad ke XX dalam era ditemukannya rekaman, yang merupakan me-
dia elektronik, yang sama artinya dengan penemuan teknik menorek pakuha, sa-
hau yang lalu. Maka film yang merupakan satu pro-
duk kebudayaan, harus ber-
fungsi kulturan, edukatif.

Menurut Asrul Sani, Kul-
tural edukatif tidak berarti
sebagai istilah yang diartikan
kang dalam bentuk jame. Kul-
tural edukatif harus diartikan
menurut hubungan dengan
pencapaian kurang pahan. Ka-
rena film tak bisa dikatakan
sebagai bisa menyebarkan pe-
nonton telah menikmatinya.
Dan, ini ini menurut Asrul
Sani merupakan tugas Dewan
Film Nasional dalam bentuk
pembinaan perfilman Natio-

nal sekarang ini.

Terutama, film yang le-
bih menekankan kepada ke-
hidupan bangsa, hubungan
yang akrab dengan bangsa,
sejarah dan lingkungannya.

Dalam rangka pembinaan
perfilman, Nasional Asrul Sa-
ni menekankan, begitu pen-
tingnya penonton. Dikatakan
memang sampai sekarang
ini, Dewan Film Nasional ti-
dak melarung film bertema
Ras dan din dan theme re-
maja. Karena film yang
dikatakan merupakan film yang
hanya goyang kepala saja,
seperti halnya film India
dan bukan tujuan dari per-
filman kita.

"Tetapi ini merupakan ba-
yi yang bisa tumbuh nanti-
nya dan, perlu meningkatkan
daya kritis sebagai tujuan
pola dasar perfilman" ujar
nya.

Menurut Asrul Sani, kita
harus berusaha adanya ke-
rangkang dalam soal pemili-
an cerita. Dan ini merupa-
kan kesempatan baik bagi
orang2 film dan bukan ha-
nya merupakan kesempatan
bagi pemilik uang saja. Ja-
di devisa, demikian kita tak
mahu juga, karena ti-
dak itu2 saja yang diangut
kan kepada penonton.

Dituturkan, hal inilah yg

menyebabkan Dewan Film
Nasional memisahkan perba-
tian dan penanganan, ber-
tali kepada Menteri, Presi-
den, DPR, dan para Pemerin-
tah Daerah. Mass media se-
ra orang2 film itu sendiri,
untuk sama2 itu, sehingga
ini agar film Nasional meru-
pakan produk kebudayaan
dan juga komersi juga.

(Bunga W/58).—